



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



IMPLEMENTASI APLIKASI ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH DAN HAMIL) DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA SIWALANPANJI KABUPATEN SIDOARJO

Disusun Oleh :

Ella Tinara (212020100110)

Dosen Pembimbing :

Lailul Mursyidah, M.AP

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025

Pendahuluan

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek mendasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi setiap individu, sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan.”. Undang-Undang tersebut menekankan perlunya upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan melalui penyediaan sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing guna mendukung visi Indonesia emas 2045. Oleh karena itu, upaya untuk mempersiapkan generasi yang unggul harus dimulai sejak dini. Namun, jika melihat dari kondisi saat ini, salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembentukan generasi berkualitas adalah tingginya risiko stunting.

Pendahuluan

Stunting merupakan kondisi ketika anak tidak tumbuh dan berkembang secara optimal akibat tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup dalam jangka waktu yang lama. Hasil SKI (Survei Kesehatan Indonesia) tahun 2023 menunjukkan bahwa stunting di Indonesia masih berada pada angka 21,5% dengan kasus terbanyak pada kelompok anak usia 2 sampai 3 tahun, angka tersebut hanya turun 0,1% dari tahun sebelumnya yaitu 21,6%. Sedangkan menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data dari SKI (Survei Kesehatan Indonesia) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi 8,4% dari tahun sebelumnya sebesar 16,1%.

Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN melalui Direktorat Bina Ketahanan Remaja mengembangkan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang diluncurkan pada tahun 2022. Aplikasi ini dirancang sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan pendampingan bagi catin (calon pengantin) selama 3 bulan sebelum pernikahan, menyediakan akses edukasi terkait kesiapan menikah dan hamil, serta menghubungkan catin dengan petugas pendamping.

Pendahuluan

Tahapan penggunaan aplikasi Elsimil diawali dengan pengurusan surat pengantar nikah oleh catin ke desa atau kelurahan. Pada tahap ini kader akan memberikan informasi mengenai aplikasi Elsimil sebagai bagian dari kelengkapan administrasi pendaftaran nikah di KUA. Setelah itu, catin akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas. Hasil dari pemeriksaan kesehatan tersebut akan digunakan sebagai dasar pengisian kuesioner dalam aplikasi yang mencakup beberapa variabel seperti usia, IMT, kadar Hb darah, ukuran LiLA, dan juga kebiasaan merokok atau keterpaparan asap rokok. Data yang diisi melalui kuesioner ini nantinya akan diproses oleh sistem untuk menentukan tingkat kesiapan catin dalam menghadapi pernikahan dan kehamilan, yang ditampilkan melalui indikator hijau yang berarti semua variabel ideal, dan indikator merah yang berarti terdapat variabel yang nilainya tidak sesuai dengan standar normal. Jika terdapat variabel yang belum sesuai, maka kader dan bidan akan memberikan pendampingan dan edukasi hingga catin mencapai kondisi yang siap untuk menikah dan hamil. Apabila catin telah memenuhi seluruh tahapan dan dinyatakan siap, sistem akan menerbitkan sertifikat siap nikah dan hamil yang digunakan sebagai dokumen pendukung saat mendaftar pernikahan di KUA.

Pendahuluan

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, Desa Siwalanpanji sebagai salah satu desa yang terletak di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo telah memanfaatkan Aplikasi Elimil sebagai alat skrining untuk mendeteksi faktor risiko stunting pada calon pengantin dan ibu hamil melalui kegiatan POSGA (Posyandu Keluarga) dengan berbagai pemeriksaan kesehatan seperti pengukuran berat badan dan tinggi badan, pengukuran LiLA (Lingkar Lengan Atas), pemeriksaan status gizi, kadar HB (hemoglobin), kadar gula darah, serta tingkat keterpaparan asap rokok. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, catin dan ibu hamil akan diberikan edukasi kesehatan dan obat-obatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas Buduran, bekerja sama dengan TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang terdiri dari sub PPKBD, kader KB, serta anggota PKK. Berikut ini adalah data catin yang terdaftar dalam aplikasi Elsimil di Desa Siwalanpanji pada tahun 2023 dan 2024.

Pendahuluan

Tabel 1. Data Catin yang Terdaftar dalam Aplikasi Elsimil

Tahun	Jumlah Calon Pengantin	Catin Terdaftar Elsimil	Berisiko Stunting
2023	49	15	0
2024	84	0	0

Sumber: Diolah dari wawancara dengan kader, 2025

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2023 dari total 49 catin perempuan, hanya 15 orang catin yang telah terdaftar dalam aplikasi Elsimil dan mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan yang diperlukan. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pun catin yang berisiko stunting. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan Elsimil mampu mendukung proses skrining kesehatan pada periode tersebut. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah catin meningkat menjadi 84 orang, namun tidak ada satu pun catin yang terdaftar dalam aplikasi Elsimil. Kondisi ini disebabkan karena adanya gangguan teknis pada aplikasi serta keberadaan beberapa catin yang bekerja di luar daerah, sehingga turut menyulitkan pelaksanaan skrining kesehatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Hamil) dalam Pencegahan Stunting di Desa Siwalanpanji Kabupaten Sidoarjo?

Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan mengenai implementasi aplikasi Elsimil dalam pencegahan stunting di Desa Siwalanpanji Kabupaten Sidoarjo masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain:

1. Minimnya sosialisasi dari pihak KUA;
2. Belum terdapat kader yang dibentuk khusus untuk Elsimil;
3. Gangguan teknis pada aplikasi;
4. Insentif yang diberikan kepada kader dinilai belum sebanding dengan beban kerja yang harus dijalani;
5. Sertifikat Elsimil belum memiliki dasar regulasi yang jelas sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA;
6. Koordinasi antarpelaksana kebijakan, seperti antara KUA, pemerintah desa, dan kader masih belum berjalan secara optimal.

Penelitian Terdahulu

Marfuah et al., (2024) dengan judul “Efektivitas Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) dalam Pencegahan Stunting pada Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

Septiyani et al., (2023) dengan judul “Evaluasi Efektivitas Elsimil dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dan Penurunan Stunting di Kota Metro”.

Aris Toening Winarni & Nova Munif I'tiskom, (2023) dengan judul “Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan”.

Metode

- **Jenis Penelitian**

Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

- **Teknik Penentuan Informan**

Menggunakan teknik *purposive sampling*.

- **Teknik Pengumpulan Data**

Menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- **Teknik Analisis Data**

Menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- **Sumber Data**

Menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- **Lokasi Penelitian**

Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

- **Teori**

Menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dalam (Tachjan, 2006):

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di Desa Siwalanpanji, dapat diketahui bahwa penyampaian informasi terkait aplikasi Elsimil dilakukan melalui pertemuan rutin kader PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), kegiatan Posyandu Keluarga, dan grup *WhatsApp*. Namun, sosialisasi dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) masih minim, sehingga banyak calon pengantin yang belum mengetahui keberadaan aplikasi ini. Berikut ini merupakan dokumentasi pertemuan rutin kader PPKBD dan juga dokumentasi penyampaian informasi Posyandu lintas usia melalui grup *WhatsApp*.

Gambar 1. Pertemuan Rutin PPKBD di Kecamatan Buduran dan Desa Siwalanpanji



Sumber: Dokumentasi kader PPKBD, 2025

Gambar 2. Penyampaian Informasi Posyandu Lintas Usia melalui Grup WhatsApp



Sumber: WhatsApp Posyandu Desa Siwalanpanji, 2025

Hasil dan Pembahasan

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di Desa Siwalanpanji, dapat diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia atau staf pelaksana dari segi jumlah kader yang aktif di Desa Siwalanpanji tercatat sebanyak 80 orang. Namun jumlah tersebut bukanlah jumlah kader yang memang dibentuk untuk program Elsimil, melainkan gabungan dari kader Posyandu, kader KB, PKK, dan PPKBD yang sekaligus merangkap sebagai pendamping Elsimil. Secara angka, jumlah kader sebenarnya sudah cukup bila dibandingkan dengan jumlah calon pengantin yang terdata. Akan tetapi, dari jumlah tersebut belum tersedia kader yang memang difokuskan untuk pendampingan Elsimil. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih peran yang menyebabkan beban kerja kader menjadi terbagi antara berbagai program, sehingga meskipun jumlahnya terlihat memadai, pelaksanaan pendampingan Elsimil belum dapat dilakukan secara optimal.

Sementara itu dari segi kompetensi, meskipun kader tidak dituntut untuk memiliki keahlian khusus, upaya untuk meningkatkan kemampuan kader tetap dilakukan melalui pembekalan dalam bentuk sosialisasi dan pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh kader PPKBD. Dari segi informasi, materi yang disampaikan kepada pelaksana tidak hanya bersumber dari sosialisasi dan pertemuan rutin kader PPKBD saja, tetapi juga bersumber dari Modul Aplikasi Elsimil. Modul ini berisi informasi mengenai pengenalan aplikasi Elsimil, alur kerja aplikasi, serta langkah-langkah pendampingan terhadap catin. Penyusunan modul ini ditujukan sebagai pedoman agar kader memahami peran dan tugas mereka dalam proses pendampingan, sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih relevan dan mudah dipahami.

Hasil dan Pembahasan

Sementara itu, dari segi fasilitas, mayoritas pengguna aplikasi Elsimil telah memiliki smartphone yang menjadi sarana penunjang utama dalam pelaksanaan kegiatan. Fasilitas pemeriksaan kesehatan seperti timbangan badan digital, alat ukur tinggi badan, meteran LiLA, tensimeter (manual dan digital), serta EasyTouch GCU (alat cek gula darah, kolesterol, dan asam urat) juga sudah tersedia dan dalam kondisi baik guna menunjang pelaksanaan kegiatan di lapangan. Namun, pelaksanaan aplikasi Elsimil di Desa Siwalanpanji justru masih menghadapi kendala teknis pada aplikasinya. Aplikasi yang seharusnya menjadi sarana utama pencatatan data calon pengantin sering mengalami kendala teknis seperti tidak bisa diakses atau server down, sehingga kader harus beralih menggunakan pencatatan manual. Meskipun demikian, kader Desa Siwalanpanji memiliki otoritas untuk mengambil keputusan sementara guna menyesuaikan metode pencatatan dan pelaporan data. Ketika terjadi gangguan teknis, kader tidak serta-merta menghentikan kegiatan, melainkan mengambil inisiatif untuk beralih ke pencatatan manual menggunakan buku atau formulir kertas.

Hasil dan Pembahasan

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di Desa Siwalanpanji, dapat diketahui bahwa kader PPKBD telah menunjukkan sikap yang terbuka, bertanggung jawab, dan adaptif dalam menjalankan tugas pendampingan, baik melalui kunjungan langsung ke rumah calon pengantin maupun kegiatan Posyandu Keluarga. Sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja kader, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp100.000 per bulan. Namun pemberian insentif ini dinilai masih belum sebanding dengan beban kerja, pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh kader. Bahkan dalam beberapa kunjungan, kader merasa perlu membawa buah tangan kepada sasaran, yang tentunya dapat menambah beban biaya mereka.

Hasil dan Pembahasan

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di Desa Siwalanpanji, dapat diketahui bahwa Elsimil telah memiliki alur pelaksanaan yang terstruktur dan dilengkapi dengan SOP (*Standard Operational Procedure*) sebagai acuan. Berikut ini merupakan gambaran dari SOP aplikasi Elsimil. Di Desa Siwalanpanji:

Tabel. 2 Alur SOP Aplikasi Elsmil di Desa Siwalanpanji

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1.	Pengurusan surat pengantar nikah di desa/kelurahan	Calon pengantin, perangkat desa	1-6 hari kerja (tergantung pada kelengkapan berkas)
2.	Pemberian informasi mengenai aplikasi Elsimil	Kader PPKBD, calon pengantin	1-2 hari
3.	Pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan	Tenaga kesehatan	1 hari (satu kali kunjungan)
4.	Input data hasil pemeriksaan kesehatan kedalam aplikasi Elsimil	Calon pengantin, kader PPKBD	1 hari setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan
5.	Proses skoring oleh sistem aplikasi	Aplikasi Elsimil (BKKBN)	Real time (saat data diinput)
6.	Pendampingan catin yang berisiko stunting	Kader PPKBD, calon pengantin	3 bulan (d disesuaikan dengan kondisi calon pengantin)
7.	Penerbitan sertifikat siap nikah dan hamil	Aplikasi Elsimil (BKKBN)	Setelah seluruh variabel terpenuhi

Sumber: Diolah dari wawancara dengan kader, 2025

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tabel 2, alur SOP aplikasi Elsimil di Desa Siwalanpanji dimulai dari tahapan pengurusan surat pengantar nikah di desa atau kelurahan hingga penerbitan sertifikat siap nikah dan hamil. Dalam setiap tahapan tersebut telah memiliki pelaksana dan penanggung jawab yang berbeda, mulai dari perangkat desa, kader PPKBD, hingga tenaga kesehatan. Sedangkan pada proses input data dan skoring akan dilakukan secara otomatis oleh system pada aplikasi Elsimil, jika dalam proses scoring tersebut ditemukan hasil dengan indikator merah, maka catin akan mendapatkan pendampingan kesehatan secara berkelanjutan selama kurang lebih tiga bulan atau hingga kondisi catin tersebut dinyatakan ideal untuk menikah dan hamil. Sertifikat siap nikah dan hamil hanya dapat diterbitkan apabila seluruh indikator telah berubah menjadi hijau, sehingga catin dinyatakan siap secara fisik untuk menikah dan hamil.

Meskipun Elsimil telah memiliki alur pelaksanaan yang terstruktur dan dilengkapi dengan SOP, namun pada praktiknya sertifikat siap nikah dan hamil belum secara resmi dijadikan sebagai syarat wajib yang harus dilampirkan saat pendaftaran pernikahan di KUA. Hal ini dikarenakan belum ada regulasi resmi dari Kementerian Agama yang mewajibkan sertifikat Elsimil sebagai dokumen administrasi, maka yang dijadikan persyaratan hanya berupa hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas saja. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri juga belum terdapat peraturan daerah yang secara spesifik mewajibkan sertifikat Elsimil sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA. Regulasi yang ada baru sebatas pada Peraturan Daerah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi saja. Belum adanya regulasi resmi yang mewajibkan sertifikat ini berdampak pada lemahnya dorongan bagi catin untuk mengisi aplikasi tersebut. Akibatnya, beberapa catin tidak memperoleh pendampingan sejak masa pranikah dan baru mendapatkan perhatian setelah memasuki fase kehamilan.

Hasil dan Pembahasan

Sementara itu, fragmentasi birokrasi terlihat dalam mekanisme koordinasi antara desa, KUA, dan kader. Proses pendampingan calon pengantin pada aplikasi Elsimil sangat bergantung pada informasi yang diperoleh kader dari pihak desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak adanya alur komunikasi yang sistematis dapat menimbulkan ketidakefisienan di lapangan. Kader tidak memiliki akses langsung terhadap data calon pengantin, melainkan harus menunggu informasi dari pihak desa. Mekanisme ini menyebabkan pendampingan menjadi tidak konsisten, karena kader bisa saja terlambat mengetahui adanya calon pengantin yang mendaftar. Proses identifikasi calon sepenuhnya bergantung pada inisiatif kader yang harus secara mandiri menelusuri informasi melalui perangkat desa. Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam struktur birokrasi, di mana koordinasi yang seharusnya terjalin secara formal antara desa, KUA, dan kader justru bergantung pada komunikasi informal. Fragmentasi semacam ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan program, karena calon pengantin dapat terlewat dari proses pendampingan pada masa pranikah yang ideal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Implementasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dalam Pencegahan Stunting di Desa Siwalanpanji Kabupaten Sidoarjo, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada variabel komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan secara aktif melalui pertemuan rutin kader PPKBD, kegiatan Posyandu Keluarga, dan grup WhatsApp. Namun, minimnya sosialisasi dari pihak KUA menyebabkan sebagian catin tidak mengetahui adanya aplikasi Elsimil.
2. Pada variabel sumber daya, fasilitas pemeriksaan kesehatan telah tersedia dengan baik dalam mendukung pelaksanaan program. Modul Elsimil juga telah digunakan sebagai panduan teknis bagi kader. Namun, belum ada kader yang memang dibentuk khusus untuk pendampingan Elsimil, sehingga masih bergantung pada gabungan dari kader-kader lainnya. Selain itu, gangguan teknis pada aplikasi juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan di lapangan.
3. Pada variabel disposisi, kader telah menunjukkan sikap terbuka, bertanggung jawab, dan adaptif dalam menjalankan tugas pendampingan, baik secara langsung melalui kunjungan ke rumah maupun saat kegiatan Posyandu Keluarga dilakukan. Akan tetapi, insentif yang diberikan masih belum sebanding dengan beban kerja yang ditanggung kader.
4. Pada variabel struktur birokrasi, penerapan aplikasi Elsimil telah didukung dengan SOP sebagai pedoman pelaksanaan. Namun, dalam praktiknya belum sepenuhnya diimplementasikan karena sertifikat Elsimil belum memiliki regulasi yang jelas untuk dijadikan syarat resmi administrasi pernikahan di KUA. Selain itu, koordinasi antara KUA, desa, dan kader masih lemah.

Referensi

- [1] K. Iorwena, “Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat,” Fokus, vol. 21, no. 1, pp. 89–98, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/view/721/pdf>
- [2] C. Winslow, “The Untilled Fields of Public Health,” vol. 51, no. 1306, pp. 23–33, 1920, [Online]. Available: <https://www.jstor.org/stable/1645011>
- [3] Pemerintah Pusat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, no. 187315. Jakarta, 2023.
- [4] E. Nurrahmawati et al., “Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kegiatan Cegah dan Tangani Stunting Untuk Meningkatkan Kesehatan Anak di Desa Eka Mulya (Mesuji Timur),” J. Pengabd. dan Perubahan Sos., vol. 1, no. 3, pp. 147–155, 2024, Available: <https://doi.org/10.62951/karya.v1i3.468>
- [5] S. Marfuah, Arpandi, and S. Hasbiyah, “Efektivitas Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Dalam Pencegahan Stunting Pada Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” J. Pelayanan Publik, vol. 1, no. 2, pp. 231–237, 2024.
- [6] BKKBN, Modul Aplikasi Elsimil (Bagi Calon Pengantin). Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, 2021.
- [7] BKPK, Survei Kesehatan Indonesia Dalam Angka 2023. Jakarta: Kemenkes RI, 2023.
- [8] kabsidoarjo.baznas.go.id, “Baznas Sidoarjo Tegaskan Komitmen Bersama Turunkan Stunting di Sidoarjo,” kabsidoarjo.baznas.go.id. Available: <https://kabsidoarjo.baznas.go.id/news-show/stunting/7451>
- [9] Wardah, Keluarga Bebas Stunting. Jakarta: Kemenkes RI, 2022.
- [10] M. R. Nugroho, R. N. Sasongko, and M. Kristiawan, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini di Indonesia,” J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini, vol. 5, no. 2, pp. 2269–2276, 2021, doi: 10.31004/obsesi.v5i2.1169.

Referensi

- [11] N. D. Rahmaulina and D. Hastuti, “Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Gizi dan Tumbuh Kembang Anak serta Stimulasi Psikososial dengan Perkembangan Kognitif Anak Usia 2-5 Tahun,” *J. Ilmu Kel. dan Konsum.*, vol. 1, no. 2, pp. 166–176, 2008, doi: 10.24156/jikk.2008.1.2.166.
- [12] Pemerintah Pusat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jakarta, 2021.
- [13] BKKBN, Modul Aplikasi Elsimil Bagi Pendamping Keluarga. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, 2022.
- [14] A. D. Roring, M. S. Mantiri, and M. T. Lopian, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,” *J. Gov.*, vol. 1, no. 2, pp. 2088–2815, 2021.
- [15] A. Hildayanti, A. Parawangi, and Rasdiana, “Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa,” *Kaji. Ilm. Mhs. Adm. Publik*, vol. 3, no. 6, pp. 1673–1686, 2022, doi: 10.26618/kimap.v3i6.10447.
- [16] D. Septiyani, D. Y. Maritasari, S. E. Irianto, A. Karyus, and Wahyuningsih, “Evaluasi Efektivitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dan Penurunan Stunting di Kota Metro,” *Pros. Snppm-5*, vol. 5, no. 1, pp. 359–366, 2023.
- [17] A. T. Winarni and N. M. I’tiskom, “Inovasi Pelayanan (ELSIMIL) Pada Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan,” *Public Serv. Gov. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 150–166, 2023, doi: 10.56444/psgj.v4i2.942.
- [18] M. Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 1, pp. 2896–2910, 2023, doi: 10.36706/jbti.v9i2.18333.
- [19] P. G. Subhaktiyasa, “Menentukan Populasi dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,” *J. Ilm. Profesi Pendidik.*, vol. 9, no. 4, pp. 2721–2731, 2024, doi: 10.29303/jipp.v9i4.2657.
- [20] Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: APII Bandung, 2006.

Referensi

- [23] A. Rahmatillah, W. Alqarni, and Afrijal, “Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward Iii,” *J. Ilm. Mhs. FISIP USK*, vol. 8, no. 3, 2023.
- [24] J. Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020. [Online]. Available: www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip
- [25] Y. Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2015.
- [26] M. A. Asyafin, D. Virdani, K. D. Kasih, and L. Arif, “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Surabaya,” *J. Publicuho*, vol. 4, no. 2, pp. 501–510, 2021, doi: 10.35817/jpu.v4i2.18061.
- [27] D. R. Maharani, Sudarmi, and H. Elfiansyah, “Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Di Kantor Pos Regional X Makassar,” *J. Unismuh*, vol. 2, no. 1, pp. 17–31, 2021, [Online]. Available: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- [28] Jumroh and M. Y. J. Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik*. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- [29] M. Yalia, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat,” *J. Penelit. Sej. dan Budaya*, vol. 6, no. 1, pp. 149–160, 2014, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/291910-implementasi-kebijakan-pengembangan-dan-093808c5.pdf>
- [30] A. Sailendra, *Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP: Standard Operating Procedures*. Yogyakarta: Trans Idea Publishing, 2015.

THANK YOU

